

**STRATEGI KOLABORATIF UPT PPA KOTA
YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN LAYANAN
KOMPREHENSIF BAGI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL ANAK**



Oleh:

**Muhamad Muhajir Ansar
NIM: 23200012028**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandan tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Muhajir Ansar
NIM : 23200012028
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Desember 2025
Saya yang menyatakan,



Muhamad Muhajir Ansar
NIM: 23200012028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Muhajir Ansar
NIM : 23200011028
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2025
Saya yang menyatakan,



Muhamad Muhajir Ansar
NIM: 23200012028



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1524/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : Strategi Kolaboratif UPT PPA Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan Layanan Komprehensif Bagi Korban Kekerasan Seksual Anak

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD MUHAJIR ANSAR, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 23200012028
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 695b39e9dd075



Pengaji II

Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 69578524074ea



Pengaji III

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
SIGNED

Valid ID: 69575fcfce499



Yogyakarta, 19 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 695b406421997

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjanan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul **STRATEGI KOLABORATIF UPT PPA KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN LAYANAN KOMPREHENSIF BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK**

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Muhamad Muhajir Ansar
NIM	:	23200012028
Jenjang	:	Magister (S2)
Prodi	:	Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	:	Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjanan UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master Of Arts (M.A)

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Desember 2025
Pembimbing

Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si.
NIM: 19750830 200604 1002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho dan ungkapan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, karya tesis ini saya persembahkan untuk:

Diri Sendiri,

Yang telah melalui batas-batas ketidakmungkinan, kekhawatiran, kegelisahan, serta pengorbanan selama kurang lebih dua tahun di Kota Yogyakarta untuk berjuang menggapai impian dan cita-cita melalui rangkaian demi rangkaian hidup yang dijalankan, baik suka maupun duka.

Bapak Nani Adam dan Mama Sitti Sajerah

Kepada kedua orang tua penulis yang telah banyak berkorban sampai detik ini baik dalam hal materi, do'a, motivasi, kasih sayang, sehingga dengannya mampu mengantarkan anakmu ini menyelesaikan studi tepat pada waktunya.

Keluarga Besar,

Yang telah berperan besar untuk memberikan dukungan, semangat dan doa dalam proses penyelesaian studi penulis.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(QS. Asy-Syarh 94:5)

“Kunci hidup bahagia adalah menjadikan hal-hal kecil berarti dan disyukuri. Karena kebahagiaan dan ketenangan hidup akan sulit bertahan di dalam diri seseorang yang tidak merasa cukup.”

“Bersabarlah pada kehidupan yang sesaat (dunia) untuk kehidupan yang abadi (akhirat).”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata selain ungkapan syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan hal tersebut, penulis bisa dengan mudah menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alahi wa Sallam* sebagai suri teladan yang baik dalam membimbing dan mengarahkan umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan cahaya melalui risalah Islam.

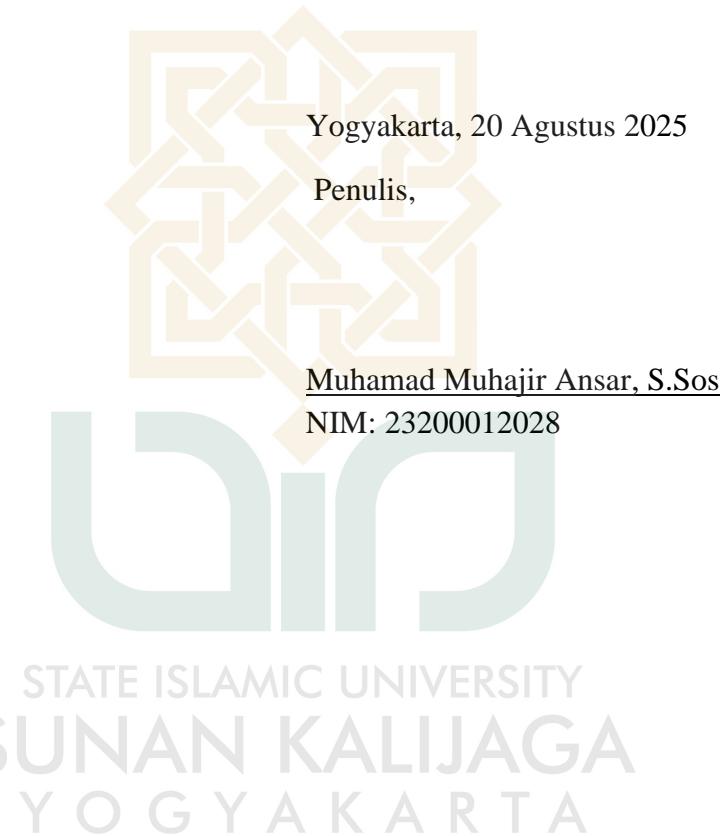
Dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini, tentu ada banyak pihak yang berperan di dalam memberikan bantuan. Baik itu berupa do'a, bimbingan, motivasi dan saran dalam penyelesaian penyusunan Tesis ini dalam menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Najib Kailani, S.Fil.I.,MA, Ph.D. Selaku Katua Prodi Studi Magister Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*.
4. Dr. Asep Jaidin, S.Ag.. M.A selaku pembimbing yang tiada hentinya membantu memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus- menerus, tanpa bosen ditengah kesibukannya dalam proses penggerjaan tesis ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Kepada Kepala Bidang P3 DP3AP2KB, Ketua UPT PPA Kota Yogyakarta, Ka. Sub Bag TU dan seluruh jajarannya yang telah membantu dan menyempatkan waktunya dalam proses pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan Tesis ini dari awal hingga akhir.
7. Teman-teman angkatan 2024 Konsentrasi Pekerjaan Sosial yang telah berjuang bersama-sama dalam proses menempuh pendidikan Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Semua keluarga dan teman-teman yang ikut andil dalam mendukung dan mendoakan peneliti. Terima kasih atas segala dukungan dan perhatiannya dalam proses dan langkah penulis untuk sampai pada cita-cita.

Semoga segala ilmu yang penulis dapatkan selama di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk diri sendiri maupun masyarakat

luas. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam meningkatkan kesempurnaan penulisan ini. Hanya kepada Allah segala kesempurnaan dan ampunan.



ABSTRAK

UPT PPA Kota Yogyakarta adalah lembaga yang memiliki tugas vital untuk menyelenggarakan pelayanan publik, mulai dari pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan, dan pemeriksaan psikologis. Pelayanan ini diwujudkan melalui kerja sama lintas sektoral, seperti lembaga kesehatan, hukum, sosial, maupun LSM. Selain itu, adanya aturan main melalui dukungan pemerintah daerah dalam hal ini SOP, MoU, dan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), mendorong mekanisme kolaborasi yang terarah. Penelitian ini mengkaji strategi kolaboratif UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak. Penelitian ini berupaya untuk menjawab dua persoalan utama, yakni bagaimana pola strategi kolaborasi yang dibangun dan faktor pendukung maupun penghambat yang dihadapi UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala UPT PPA Kota Yogyakarta, KA. Sub Bag TU, Manajerial Kasus, Satgas Sigrak, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola strategi kolaborasi UPT PPA Kota Yogyakarta dilakukan melalui pembentukan jaringan mitra kolaborasi, koordinasi formal dan nonformal berbasis SOP dan MoU, penguatan kapasitas SDM, inovasi layanan terpadu. Pola strategi ini terwujud dengan adanya beberapa faktor pendukung, seperti kapasitas dari SDM yang ada di UPT PPA Kota Yogyakarta, adanya komitmen yang kuat antar jejaring mitra, dan dukungan dari pemerintah. Faktor tersebut menjadi fondasi yang sangat kuat dalam mewujudkan layanan

komprehensif. Namun demikian, di sisi lain terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas kolaborasi, antara lain rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat, kompleksitas kondisi serta permasalahan yang dihadapi anak, serta adanya perbedaan kebijakan dan mekanisme birokrasi di masing-masing lembaga yang terlibat. Terlepas dari masalah di atas, keberadaan UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai lembaga pelayanan terpadu (*one-stop service*) sekaligus aktor *fasilitator* kolaborasi memungkinkan sistem layanan tetap berjalan, meskipun implementasinya di tingkat operasional belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: UPT PPA Kota Yogyakarta, Strategi Kolaboratif, Layanan Komprehensif, Kekerasan Seksual Anak.



DAFTAR ISI

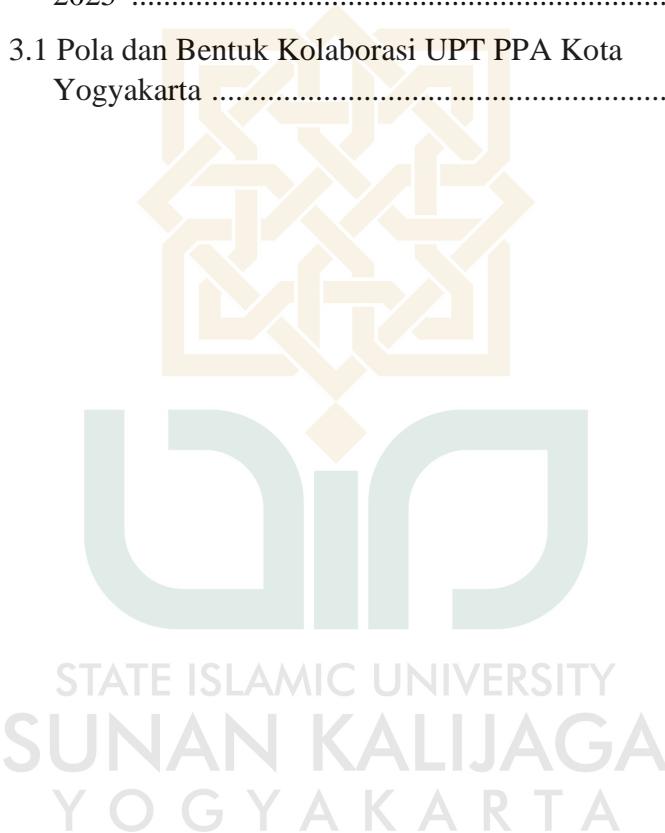
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	12
D. Kajian Pustaka	14
1. Kolaboratif dan Pelayanan Multisektoral terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak	14
2. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di UPT PPA.....	21
E. Kerangka Teori	27
F. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34

2. Lokasi Penelitian	35
3. Sumber Data	35
4. Subjek Penelitian.....	37
5. Teknik Pengumpulan Data	38
6. Analisis Data	42
7. Validasi Data	44
G. Sistematika Pembahasan	44
BAB II UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) KOTA YOGYAKARTA.....	46
A. Gambaran Umum Lembaga	46
B. Dasar Pembentukan.....	47
C. Visi dan Misi	48
D. Struktur Kepengurusan UPT PPA Kota Yogyakarta....	49
E. Bentuk dan Alur Layanan	51
F. Jenis Kasus Kekerasan yang ditangani	53
G. Kategori Kasus Kekerasan yang ditangani UPT PPA Kota Yogyakarta.....	54
H. Jejaring UPT PPA Kota Yogyakarta	55
BAB III POLA STRATEGI KOLABORASI UPT PPA KOTA YOGYAKARTA.....	57
A. Pola dan Bentuk Kolaborasi yang dibangun UPT PPA Kota Yogyakarta	57
B. Layanan Komprehensif bagi Korban Kekerasan Seksual Anak	84

C. Analisis Pola Strategi Kolaborasi UPT PPA Kota Yogyakarta	115
BAB IV FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT UPT PPA KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK	133
A. Faktor yang Mempengaruhi Layanan Komprehensif UPT PPA Kota Yogyakarta bagi Korban Kekerasan Seksual Anak	133
B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Layanan Komprehensif UPT PPA Kota Yogyakarta bagi Korban Kekerasan Seksual Anak	150
BAB V PENUTUP	160
A. Kesimpulan.....	160
B. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	171
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	172

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peta Konseptual Teori <i>Collaborative Governance</i> ..	33
Tabel 1.2 Daftar Informan Penelitian	41
Tabel 2.1 Struktur Kepengurusan UPT PPA Kota Yogyakarta 2025	49
Tabel. 3.1 Pola dan Bentuk Kolaborasi UPT PPA Kota Yogyakarta	130



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Kasus yang ditangani UPT PPA Kota Yogyakarta Tahun 2018-2024.....	5
Gambar 1.2 Model Teori <i>Collaborative Governance</i>	28
Gambar. 2.1 Alur Layanan UPT PPA Kota Yogyakarta.....	51
Gambar. 2.2 Kategori Kasus Kekerasan yang ditangani UPT PPA Kota Yogyakarta.....	54
Gambar. 2.3 Jejaring UPT PPA Kota Yogyakarta	55
Gambar. 3.1 Alur Layanan UPT PPA Kota Yogyakarta.....	88
Gambar. 3.2 Model Layanan Terpadu (<i>one-stop service</i>) UPT PPA Kota Yogyakarta	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak didefinisikan sebagai aset bangsa yang merupakan generasi penerus memiliki cita-cita dan harapan untuk membangun bangsanya menjadi lebih baik. Sudah seharusnya anak-anak mendapatkan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik maupun mentalnya. Hal ini bertujuan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik, serta terlindung dari ancaman kejahatan yang membahayakan sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹ Namun pada kenyataannya perlindungan dan kesejahteraan sosial anak secara penuh belum begitu dirasakan bagi sebagian anak. Mulai dari diskriminasi, penelantaran, *bullying*, pembunuhan, hingga kasus kekerasan seksual yang masih dirasakan dan banyak terjadi di beberapa tempat.

Dalam konteks kekerasan seksual, kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang sangat serius, dengan dampak yang sangat mendalam bagi korban dan keluarganya. Tindakan seperti ini menyelisihi berbagai norma, baik asusila, agama,

¹ Tetti Solehati et al., “Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review,” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 2202.

maupun hukum. Anak-anak sering kali terarah pada ketergantungan dan kelemahan, menjadi sangat beresiko terhadap kekerasan seksual.² Fenomena kekerasan seksual terhadap anak adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks, karena menyentuh aspek fisik, psikologis, sosial, kesehatan, dan moral anak sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Kasus kekerasan seksual tidak hanya mengakibatkan penderitaan bagi korban dan keluarga, tetapi juga menjadi indikator lemahnya sistem perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi tantangan dan persoalan yang sangat serius. Pasalnya, data kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak masih menunjukkan angka yang relatif sangat tinggi di setiap tahunnya. Data Komnas Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat 1.731 kasus kekerasan (21%) di ranah publik, di mana kasus yang paling menonjol di ranah ini adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus. Data ini menunjukkan

² Mhd Sayyid, Ihsan Rambe, and Atikah Rahmi, “PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand),” *Jurnal Ilmiah Penelitian V*, no. 1 (2024): 20–30.

bahwa kasus pelecehan seksual pada anak bukan perkara ringan. Harus ada upaya konkret dan segera untuk menguranginya.³ Sedangkan menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dan jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024.⁴

Melihat angka kasus Kekerasan Seksual Anak (KSA) yang relatif tinggi, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjawab dan menangani permasalahan kekerasan pada anak. Dalam konteks perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁵ Selain itu pemerintah Indonesia juga telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di berbagai daerah di Indonesia.

³ Siti Sarah, “Systematic Literature Review: Riset Pelecehan Seksual Pada Anak Di Indonesia,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 18, no. 2 (2023): 328–329.

⁴ “Simfoni Kemen PPPA,” accessed March 5, 2025, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>.

⁵ Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Syuha,” *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021 2*, no. 1 (2021): 32.

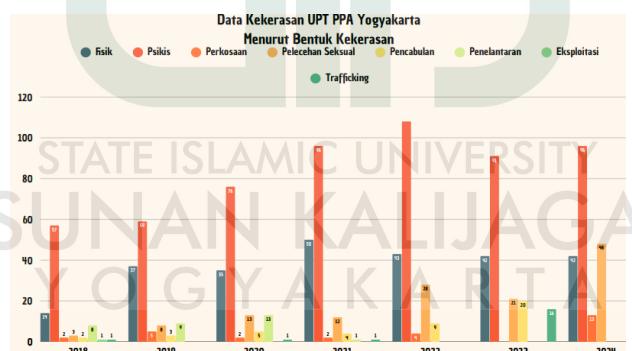
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ini telah dijelaskan dalam amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Tugas dari UPTD PPA yang sangat penting adalah merespon setiap tindakan kekerasan yang ada di masyarakat dan siap menerima laporan tindak kekerasan, yang diaktualisasikan melalui pelayanan terpadu atau kolaboratif, meliputi tindakan pendampingan seperti pendampingan psikologi, medis, hukum, dan rohaniah bagi korban anak kekerasan seksual.⁶ Keberadaan UPT PPA tidak hanya memberikan pendampingan dan pelayanan terhadap permasalahan kekerasaan seksual. Akan tetapi diharapkan dapat mengikis angka kekerasan seksual yang terjadi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak kekerasan seksual terhadap anak, seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta belakangan ini.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) DIY mencatat terdapat kenaikan kasus kekerasan anak di wilayahnya sepanjang semester pertama 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada semester pertama atau Januari-Juni 2023 kekerasan anak yang tercatat berada di angka 222 kasus. Sementara pada tahun ini sampai dengan Juni telah terjadi sebanyak 226 kekerasan anak yang

⁶ Devi Sri Maharani, Nazaki Nazaki, and Uly Sophia, “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur,” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 3 (2024): 1367.

tersebar di empat kabupaten satu kota di wilayah setempat. Wilayah Kabupaten Sleman menjadi wilayah tertinggi dengan 73 kasus diikuti kota Jogja 65 kasus, Bantul 41 kasus, Gunungkidul 32 kasus dan Kulon progo 16 kasus. Usia rata-rata yang paling banyak mendapatkan kekerasan yaitu umur 11-17 tahun di angka 164 kasus. Adapun, berdasarkan bentuk dan jenisnya kekerasan yang dialami anak itu terdiri dari kekerasan psikis sebanyak 209 kasus, kekerasan fisik 201 kasus, kekerasan seksual 145 kasus, penelantaran 20 kasus dan eksploitasi tiga kasus.⁷

Dalam konteks Kota Yogyakarta, kasus kekerasan seksual yang terjadi menunjukkan angka yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang dirilis oleh UPT PPA Kota Yogyakarta berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi. Data tersebut digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini:



Gambar 1.1 Data Kasus yang ditangani UPT PPA Kota Yogyakarta Tahun 2018-2024

⁷ Abdul Hamied Razak, “Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Ini Upaya DP3AP2 DIY,” accessed January 20, 2025, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/08/05/510/1183702/kasus-kekerasan-anak-meningkat-ini-upaya-dp3ap2-diy>.

Berdasarkan data UPT Kota Yogyakarta tersebut, kekerasan seksual yang ditangani oleh UPT PPA dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir mengalami perbedaan di setiap tahunnya. Pada tahun 2018, kekerasan seksual yang terjadi dalam bentuk perkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan adalah sebanyak 5 kasus, pada tahun 2019 kekerasan seksual yang terjadi sebanyak 16 kasus, tahun 2020 kasus kekerasan seksual menunjukkan kenaikan yang tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 20 kasus, sedangkan pada tahun 2021 kasus yang terdata sebanyak 18 kasus, dan di tahun berikutnya yaitu 2022, 2023, dan 2024 kasus kekerasan seksual yang terdata yaitu sebanyak 143 kasus.⁸ Selain data di atas, hal ini diperkuat juga oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti di UPT PPA Kota Yogyakarta. Jumlah kasus kekerasan seksual khususnya anak di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tiga tahun belakang, mulai dari tahun 2022 sampai 2024 relatif tinggi. Pada tahun 2022 jumlah kasus 27 orang, tahun 2023 berjumlah 40 kasus dan di tahun 2024 kasus yang masuk berjumlah 44 kasus.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Yogyakarta menunjukkan kenaikan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, baik dari segi jumlah dan kompleksitas kasus. Hal ini seolah berlawanan dengan karakter budaya Yogyakarta sendiri, sehingga Yogyakarta menjadi wilayah yang paling rawan di Pulau Jawa.

⁸ “Profil UPT PPA Kota Yogyakarta” (2025).

Perlakuan-perlakuan yang tidak wajar dilakukan secara terang-terangan kepada lawan jenis adalah salah satu masalah pelecehan seksual yang akhir-akhir ini menjadi gangguan dan keresahan pihak kepolisian dan masyarakat Yogyakarta sendiri.⁹

Menindak lanjuti permasalahan di atas, pemerintah Kota Yogyakarta memiliki perhatian besar dalam menyikapi isu-isu kekerasan, khususnya anak korban kekerasan seksual. Hal ini terbukti dengan adanya keterlibatan aktif pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta sebagai lembaga pemerintah dalam membuat kebijakan di tingkat dinas, berperan sebagai inisiator kebijakan, mengalokasikan anggaran, merumuskan pedoman teknis, dan menginisiasi nota kesepahaman (MoU). Dalam menyikapi permasalahan kasus kekerasan seksual di Kota Yogyakarta, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan aturan melalui peraturan Walikota (Perwal) dan Peraturan Daerah (Perda). Kebijakan dan aturan tersebut diantaranya Standar Pelayanan Publik (SPP) UPT PPA Kota Yogyakarta No 60 Tahun 2022, Keputusan Walikota No 301 Tahun 2023, Keputusan Walikota No 320 tentang FPKK 2024-2027, dan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2025. Tujuannya adalah sebagai landasan hukum, kerangka kerja, dan pedoman manajemen pelayanan publik.

⁹ Aura Aulia Putri S, “Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 71.

UPT PPA Kota Yogyakarta di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sendiri sebagai pelaksana teknis yang bertugas dalam memberikan perlindungan, pendampingan, pemulihan, maupun rujukan kepada korban. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, UPTD PPA Kota Yogyakarta melakukan sebuah strategi kolaboratif layanan dengan berbagai lembaga lintas sektoral. Menurut Assaury tujuan dari penetapan strategi adalah untuk mencapai sasaran untuk tujuan kinerja organisasi jangka panjang.¹⁰ Strategi dalam penelitian ini berfokus pada perencanaan, inovasi, pelaksanaan program, dan aktivitas program yang dilaksanakan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dapat memberikan jaminan pelayanan yang holistik bagi anak korban kekerasan seksual. Jaminan pelayanan ini akan tercapai dengan baik bila mana ada keterlibatan dan dukungan dari berbagai pihak melalui konsep kolaboratif.

Kolaborasi ini menuntut hadirnya model penanganan yang kolaboratif lintas sektoral, mengingat masalah korban begitu kompleks dan tidak bisa dijalankan secara tunggal oleh UPT PPA, melainkan membutuhkan dukungan dari institusi lain. Berdasarkan hasil temuan lapangan, peneliti melihat bahwa kolaboratif yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta

¹⁰ Nuzulul Rahmi, Nofriadi, and Saddam Rassanjani, “Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 7, no. 1 (2023): 4–5.

dilakukan dengan menggandeng beberapa jaringan lintas sektoral seperti Polresta Yogyakarta, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Balai Rehabilitasi, LSM, Satgas Sigrak dan beberapa pihak terkait lainnya yang tergabung ke dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) sebagai wadah untuk melakukan koordinasi dan bersinergi dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual anak yang ada di Kota Yogyakarta.

Dalam kerangka teoritis, pendekatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga tersebut dapat bekerja sama dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di Kota Yogyakarta. Pendekatan ini menekankan adanya kepercayaan masing-masing lembaga (*starting conditions*), struktur kelembagaan yang jelas (*institutional design*), peran pemimpin dalam memfasilitasi kerja sama (*facilitative leadership*), dan adanya proses kolaborasi yang berkesinambungan (*collaborative process*). Komponen pendekatan ini bisa menjadi kerangka analisis bagi peneliti untuk melihat sejauh mana kolaborasi yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta berjalan dengan efektif guna menciptakan layanan komprehensif.

Permasalahan praktis yang dihadapi antara UPT PPA Kota Yogyakarta dan mitra kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual anak juga cukup jelas. Beberapa faktor penghambat yang peneliti temukan di lapangan antara lain: masalah koordinasi lintas sektoral yang lambat akibat pengetahuan pegawai dan staf tentang penanganan kasus kekerasan seksual anak yang kurang,

standar pelayanan yang berbeda, kebijakan yang berubah-ubah, proses sosialisasi atau internalisasi yang lambat, dan kompleksitas korban yang semakin besar. Salah satu penelitian di bidang penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan di Kota Tangerang masih belum optimal karena beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan minat untuk mengakses layanan pelaporan kekerasan, dan masih adanya duplikasi laporan.¹¹ Hal ini dipengaruhi oleh kolaborasi dan pelayanan yang kurang terintegrasi dengan lembaga lintas sektoral yang mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan dengan optimal.

Sebagai antitesis, berbagai penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa faktor-faktor pendukung dapat memberikan kekuatan terhadap layanan komprehensif seperti kolaborasi yang terstruktur dengan adanya MoU atau SOP antar lembaga, forum kolaborasi rutin, komunikasi daring atau luring antar mitra layanan, inovasi layanan, kepemimpinan aktor yang memfasilitasi mekanisme layanan terbukti mempercepat penanganan dan keefektifan pendampingan yang diberikan. Sebagai contoh, penelitian di Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas DP3A dengan LSM berhasil menciptakan kerja sama yang baik. Hal ini terlihat dalam pelayanan terpadu bagi korban kekerasan seksual anak seperti

¹¹ Siti Maria Ulfa and Listyaningsih, "Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tangerang," *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 8, no. 2 (2024): 62–80.

pemberian pendidikan, edukasi masyarakat, penanganan medis dan fisik, pendampingan hukum, dan pendampingan lainnya.¹²

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah membahas kolaborasi dalam layanan perlindungan anak, peneliti memandang bahwa masih terdapat kesenjangan dalam memahami strategi kolaborasi yang spesifik oleh beberapa lembaga atau aktor yang terlibat bersama UPT PPA Kota Yogyakarta guna mewujudkan layanan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana pola strategi tersebut dibangun, dijalankan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam konteks Kota Yogyakarta.

Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana pola strategi UPT PPA Kota Yogyakarta dibangun dalam penyelenggaraan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya. Fokus ini penting tidak hanya untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi UPT PPA sebagai lembaga utama dalam penanganan kekerasan seksual pada anak, bagaimana UPT PPA Kota Yogyakarta berupaya mengimplementasikan prinsip *Collaborative Governance* dalam mewujudkan layanan yang komprehensif bagi

¹² Kristoforus Tueng Ruing, Frans Bapa Tokan, and Eusabius Separera Niron, “Kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Lsm Permata Lembata Dalam Merehabilitasi Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Lembata,” *Journal Education and Government Wiyata* 3, no. 1 (2025): 214–215.

korban kekerasan seksual anak. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran jelas terkait praktik kolaboratif yang efektif, efisien, dan terarah. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi besar di dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat jejaring kolaborasi bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola strategi kolaborasi yang dibangun oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera dalam rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan: *Pertama* menganalisis pola strategi kolaborasi yang dibangun oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak. *Kedua*, mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak. Sedangkan signifikansi penelitian ini meliputi dua bagian, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran, informasi, dan pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat baik dari segi pandangan dan pola pikir terhadap perlindungan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep-konsep dan strategi yang efektif dalam pengembangan model *Collaborative Governance* di aspek perlindungan korban kekerasan seksual anak, memberikan bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi kolaborasi terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang pendekatan yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah nyata dan memberikan solusi terhadap hambatan di dalam proses penanganan korban kekerasan seksual pada anak, memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah daerah dan lembaga mitra dalam memperkuat sistem perlindungan anak yang efektif. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta saran untuk UPT PPA dalam peningkatan kualitas layanan bersama jejaring kolaborasi lintas sektoral.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelusuran tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Semua tinjauan pustaka yang telah diperoleh dari literature sangat membantu penulis mengkaji dan membuka pemahaman lebih dalam untuk penelitian baru yang penulis akan lakukan. Selain itu, dalam ruang lingkup riset kajian pustaka juga sangat bermanfaat untuk memberikan perluasan informasi serta pengetahuan dasar bagi peneliti lain yang akan menjalankan risetnya. Di dalam penelitian ini, penulis berfokus pada strategi kolaboratif yang dibentuk melalui layanan yang bersifat komprehensif dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Pada kajian pustaka ini, penulis memperoleh beberapa literatur terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan analisis dan pertimbangan di dalam penelitian ini seperti artikel, skripsi, tesis, buku, dan sumber lainnya. Untuk memastikan penelitian ini memiliki *novelty* dan bukan sebagai hasil dari tiruan, maka di bawah ini penulis sajikan beberapa penelitian sejenis atau memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

Adapun tema besar yang penulis petakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Kolaboratif dan pelayanan multisektoral terhadap perlindungan perempuan dan anak dan (2) Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPT PPA. Beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan topik penelitian ini akan dipaparkan pada bagian berikut.

1. Kolaboratif dan pelayanan multisektoral terhadap perlindungan perempuan dan anak

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut berfokus pada beberapa pembahasan yaitu yang kolaborasi, integrasi, kerja sama dan lain sebagainya. Diantaranya artikel yang ditulis oleh Fasicha Chariratul Azani dkk dengan judul “Strategi Kolaboratif Multisektor dalam Mengatasi Perundungan Anak: Studi Kasus Kota Bogor”.¹³ Penelitian ini menyimpulkan Pemerintah Kota Bogor telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dan multi-level dalam upaya mengatasi perundungan anak, yang diwujudkan melalui penerbitan Surat Keputusan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017. Pendekatan yang digunakan dalam upaya ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan edukasi. Namun proses yang dilakukan belum begitu efektif karena beberapa faktor seperti pemahaman masyarakat terhadap isu perundungan dan kurangnya keterlibatan masyarakat.

Penelitian terkait lainnya yang ditulis oleh E. Ericson dan Sutrisno berjudul “Kolaborasi antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan

¹³ Chariratul Azani Fasicha, Didin Muhamidin, and Sawitri Budi Utami, “Strategi Kolaboratif Multisektor Dalam Mengatasi Perundungan Anak: Studi Kasus Kota Bogor,” *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)* 10, no. 1 (2024): 40–64.

Kasus KDRT”.¹⁴ Artikel ini menegaskan bahwa penanganan KDRT adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan lintas disiplin dan kolaborasi antar lembaga. Unit PPA fokus pada penegakan hukum, sementara lembaga perlindungan menyediakan dukungan psikososial dan perlindungan bagi korban. Melalui kolaborasi, kedua pihak dapat menggabungkan pengetahuan, data, dukungan psikologis, dan pelatihan yang berbeda untuk melindungi korban secara lebih baik dan menindak pelaku secara lebih efektif. Selain itu, proses kolaborasi yang dilakukan memunculkan beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya, masalah koordinasi, perbedaan prioritas dan pendekatan, dan beberapa tantangan lain.

Artikel yang ditulis oleh Panagitab Nababan dkk dengan judul “Analisis Strategi Pendampingan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Kasus Pelecehan Seksual di Tapanuli Tengah”.¹⁵ Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas strategi pendampingan kasus pelecehan seksual dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja DP3A. Artikel ini menyoroti peran penting DP3A dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban,

¹⁴ E.Ericson and Sutrisno, “Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bogor Dan Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus KDRT,” *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2024): 1–13.

¹⁵ Panagitab Nababan et al., “Analisis Strategi Pendampingan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Di Tapanuli Tengah,” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan* 15, no. 4 (2024).

memastikan proses hukum berjalan dengan baik, serta menguraikan berbagai aspek strategi pelayanan yang mencakup pencegahan (edukasi dan sosialisasi), penanganan langsung kasus (konseling, bantuan hukum, rehabilitasi fisik dan psikologis), dan advokasi.

Berdasarkan ketiga artikel di atas, terdapat beberapa aspek persamaan dan perbedaan yang ada di dalamnya. Persamaannya fokus pada perlindungan perempuan dan anak, pendekatan kolaboratif dalam penanganan kasus yang digunakan, peran lembaga terkait, dan kendala yang dihadapi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Adapun yang menjadi perbedaan mencolok dari ketiga artikel di atas adalah jenis kekerasan yang menjadi fokus kajian, lokasi, aktor yang berkolaborasi dan terlibat di dalam proses pendampingan klien. Sementara itu, perbedaan mendasar antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji adalah terletak pada fokus kajian pada pola strategi kolaboratif yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta secara lebih komprehensif, bukan hanya pada strategi yang dibangun, akan tetapi melihat sejauh mana faktor pendukung dan penghambat berpengaruh pada strategi yang dilakukan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual anak di Kota Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraisyah dkk dengan judul “*Collaborative Governance in Child Protection in Tasikmalaya*

Regency".¹⁶ Penelitian ini menyoroti sejauh mana *collaborative governance* berkontribusi terhadap upaya perlindungan anak di Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil penelitian tersebut, masih terdapat ketimpangan yang terjadi dan belum memenuhi dimensi penting dalam pendekatan *collaborative governance* seperti kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Hal ini terlihat dari belum adanya kesamaan visi antara lembaga terkait, belum adanya aturan yang jelas, dan masalah komunikasi yang belum berjalan secara optimal. Sementara itu, penelitian yang dilakukan di UPT PPA Kota Yogyakarta telah memenuhi dimensi *collaborative governance* seperti adanya kesamaan awal dalam proses kolaborasi, adanya aturan berupa MoU dan SOP, pertemuan yang dilakukan secara aktif, dan aspek lain yang sudah diterapkan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti strategi kolaborasi yang dibentuk secara komprehensif, tetapi menelaah faktor pendukung dan penghambat proses kolaborasi yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Nuraisyah dkk hanya menitikberatkan pada *collaborative governance* yang dilakukan kepada anak di Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan penelitian ini fokus pada pola strategi

¹⁶ Nuraisyah, Dandan Haryono, and Sri Heryanianto, "Collaborative Governance In Child Protection in Tasikmalaya Regency," *Proceedings of the 2nd International Interdisciplinary Conference on Environmental Sciences and Sustainable Developments Education and Green Economy (IICESSD-EGE 2022)* (2023): 113–119.

UPT Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.

Penelitian oleh Ulfat Shaikh dkk dengan judul “*Multisector Collaborations At Children’s Hospitals To Address Social Drivers Of Health*”.¹⁷ Penelitian ini mengkaji bagaimana rumah sakit anak di Amerika Serikat mengembangkan, melaksanakan, dan mempertahankan kolaborasi multisektor untuk memperkuat layanan berbasis masyarakat. Penelitian tersebut juga menekankan upaya transformatif layanan kesehatan anak yang tidak hanya berfokus pada perawatan rumah sakitnya saja, tetapi menjadi sistem layanan terpadu antar komunitas. Adapun perbedaan antara penelitian Ulfat Shaikh dkk dan penelitian ini adalah terletak pada fokus dan pendekatannya. Di mana penelitian tersebut fokus mengkaji penanganan kesehatan pada anak, akses layanan, pencegahan dan pendekatannya saja. Sementara penelitian ini lebih bersifat komprehensif dalam menangani korban kekerasan seksual khususnya anak. Selain itu, penelitian ini menekankan pada pola kolaborasi yang dibangun dan dijalankan secara menyeluruh dengan berbagai pihak, baik komunitas maupun lembaga pemerintah seperti rumah sakit, kepolisian, dinas, dan LSM.

Penelitian oleh Fahrunnisa Hidayat dkk dengan judul “*Persepsi Penyedia Layanan Bagi Penyintas Kekerasan Seksual*

¹⁷ Ulfat Shaikh, Melissa Gosdin, and Elizabethe Helmke, “*Multisector Collaborations at Children’s Hospitals to Address Social Drivers of Health*,” *International Journal for Quality in Health Care* 37, no. 3 (2025): 1–9.

Terhadap Layanan Manajemen Klinis Perkosaan”.¹⁸ Penelitian ini menunjukan bahwa persepsi penyedia layanan tentang manajemen klinis bagi penyintas kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari pengetahuan, norma sosial, dan kebijakan hukum. Di sisi lain, penelitian ini mengkaji pola strategi kolaboratif yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta secara lebih komprehensif dengan melibatkan lembaga lintas sektoral, bukan hanya pada strategi yang dibangun, akan tetapi melihat sejauh mana faktor pendukung dan penghambat berpengaruh pada strategi yang dilakukan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual anak di Kota Yogyakarta. Dengan demikian perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitiannya, di mana penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dkk di atas fokus pada aspek pemahaman penyedia layanan dan penanganan kekerasan seksual pada aspek medis mulai dari pendokumentasian cedera, pengumpulan bukti forensik, perawatan cedera, evaluasi infeksi menular seksual (IMS), dan dukungan psikososial.

Regita Khoirunnisa dkk dengan judul “Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan”.¹⁹ Artikel ini membahas tentang pelayanan sosial untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Mulai dari bagaimana kekerasan tersebut terjadi

¹⁸ Fahrunnisa Hidayat et al., “Persepsi Penyedia Layanan Bagi Penyintas Kekerasan Seksual Terhadap Layanan Manajemen Klinis Perkosaan,” *Seminar Nasional Sosiologi* 4, no. 1 (2023): 149–173.

¹⁹ Regita Khoirunnisa, Muhammad Fedryansyah, and Risna Resnawaty, “Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan,” *Jurnal Pekerjaan Sosial* 22, no. 1 (2023): 218–225.

hingga tahap-tahap pelayanan sosial yang diberikan seperti: Tahapan pendekatan, pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment), perencanaan pemecahan masalah (planning), pelaksanaan pemecahan masalah (intervention), evaluasi, terminasi dan rujukan. Selain daripada itu, artikel ini menjelaskan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak beragam, mulai dari fisik, seksual, emosional, penelantaran, dan ekonomi. Sementara itu, penelitian ini mengkaji pola strategi kolaboratif yang dibentuk dan dijalankan antara UPT PPA Kota Yogyakarta dengan berbagai lembaga lintas sektoral dan berfokus pada anak yang mengalami korban kekerasan seksual. Sementara penelitian oleh Regita Khoirunnisa dkk lebih bersifat umum pada aspek penanganannya saja bukan pada penguatan jaringan kolaborasi.

2. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPT PPA

Mengenai keterlibatan pihak pemerintah dalam hal ini UPTD PPA dalam menangani permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, peneliti menemukan beberapa penelitian terkait yang memiliki fokus yang hampir sama yaitu penelitian yang ditulis oleh Viezna Leana²⁰ dan Devina.²¹ Penelitian tersebut menyoroti tentang peranan UPTD PPA dalam penanganan korban kekerasan

²⁰ Viezna Leana Furi and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, “Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan,” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 122–129.

²¹ Devina Agnes Berlian Atika Putri and Tukiman, “Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 3 (2023): 274–283.

seksual, baik perempuan dan anak. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran yang dilakukan adalah berupa penerimaan pengaduan, penjangkauan, pendampingan kesehatan, psikologi, hukum, psikoedukasi dan pendampingan rehabilitasi sosial korban kekerasan. Selain itu juga, penelitian ini menyoroti juga beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya penguatan jaringan sosial. Di sisi lain, penelitian ini mengkaji pola strategi kolaboratif yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta secara lebih komprehensif dengan melibatkan lembaga lintas sektoral dan melihat sejauh mana faktor pendukung dan penghambat berpengaruh pada strategi yang dilakukan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual anak di Kota Yogyakarta. Dengan demikian perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitiannya, peneliti melihat penelitian yang dilakukan oleh Viezna Leana dan Devina berfokus pada peran semata, sementara penelitian ini bukan hanya melihat pada upaya atau peran, tetapi pada strategi kolaboratif antar lembaga lintas sectoral.

Aulia Regita Dewi Fitriana dan Arimurti Kriswibowo menulis artikel dengan judul “*Case Management Approach to Overcoming the Violence Against Child (Study at the Regional Technical Implementation Unit for the Women and Children Protection, Sidoarjo Regency)*”.²² Menyoroti tentang manajemen

²² Aulia Regita Dewi Fitriana and Arimurti Kriswibowo, “Case Management Approach to Overcoming The Violence Against Child (Study at the Regional Technical Implementation Unit for the Women and Children Protection, Sidoarjo Regency)”, *Journal of Islamic State Islamic University Syarif Hidayah*, Vol. 1 No. 1, 2019, pp. 1-10.

kasus tentang penanggulangan kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen kasus dalam penanggulangan korban kekerasan terhadap anak di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah manajemen kasus yang dilakukan berupa identifikasi masalah, asesmen, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi, serta terminasi telah dilakukan dengan baik namun belum berhasil menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Adapun perbedaan antara penelitian Aulia Regita Dewi Fitriana bersama Arimurti Kriswibowo dan penelitian ini adalah terletak pada fokus. Di mana penelitian tersebut fokus mengkaji manajemen kasus pada anak. Sementara penelitian ini lebih bersifat komprehensif dalam menangani korban kekerasan seksual khususnya anak. Selain itu, penelitian ini menekankan pada pola kolaborasi yang dijalankan dan dibangun oleh UPT PPA Kota Yogyakarta secara menyeluruh dengan berbagai mitra, baik komunitas maupun lembaga pemerintah seperti rumah sakit, kepolisian, dinas, dan LSM.

Artikel yang ditulis Tetty Dwiyanti dan Musdalipah menyoroti tentang “Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota

Protection, Sidoarjo Regency),” *Journal of Economics, Business, and Government Challenges* 5, no. 01 (2022): 66–74.

Makassar”.²³ Penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas penanganan yang dilakukan UPTD PPA Kota Makassar sudah berjalan dengan cukup efektif. Hal ini terlihat dari tujuan dan rencana yang telah disusun dalam menangani kekerasan perempuan dan anak sudah ditangani dengan baik. Selain itu, upaya penanganan kekerasan perempuan dan anak yang dijalankan oleh UPTD PPA secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yaitu pada aspek indikator integrasi dari aspek sosialisasi masih belum berjalan dengan optimal karena keterbatasan SDM dan anggaran. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan pada pola strategi kolaboratif UPT PPA Kota Yogyakarta dalam menciptakan layanan secara komprehensif dengan melibatkan lembaga lintas sektoral seperti lembaga pemerintah dan non pemerintah. Dengan demikian perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitiannya, peneliti melihat penelitian yang ditulis oleh Tetty Dwiyanti dan Musdalipah berfokus efektivitas layanan dengan mempertimbangkan pada tujuan dan rencana yang dilakukan. Sementara penelitian ini bukan hanya melihat pada hasil yang telah dilakukan, tetapi pada strategi kolaboratif yang dilakukan antar lembaga lintas sektoral seperti kepolisian, rumah sakit, dinas, LSM, balai rehabilitasi sosial, dan lembaga lainnya.

²³ Tetty Dwiyanti and Musdalipah, “Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Makassar,” *YUME : Journal of Management* 5, no. 1 (2022): 58–67.

Penelitian tesis yang dibahas oleh Nur Afni terkait dengan topik pembahasan “Kontrol Sosial DPPPA Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak”.²⁴ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual dan bagaimana bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh DPPPA Aceh dalam penanggulangan preventif mengatasi kekerasan seksual yang terjadi. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, faktor internal yang meliputi gangguan mental, dorongan emosional, kurangnya moralitas, kurangnya pengetahuan tentang seksualitas dan implus seksual. *Kedua*, faktor eksternal berupa perkembangan teknologi dan penyalahgunaan gadget dengan membuka situs-situs pornografi. Bentuk penanganan yang diberikan oleh DPPPA Aceh yaitu melalui UPTD PPA dengan memberikan pendampingan khusus kepada korban sesuai dengan kebutuhan korban dalam tahapan proses pemulihan serta mengembalikan keberfungsian sosialnya dalam lingkungan masyarakat. Sementara itu, penelitian ini akan mengkaji seperti apa pola strategi kolaboratif UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan secara komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak. Bukan berfokus pada penanggulangan kekerasan seksual, tetapi bagaimana UPT PPA Kota Yogyakarta berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai

²⁴ Nur Afni, “Kontrol Sosial DPPPA Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

lembaga terkait untuk menciptakan layanan komprehensif agar memastikan anak mendapatkan layanan secara cepat dan terarah.

Setelah menelusuri berbagai literatur terkait, penulis melihat bahwa penelitian tentang strategi kolaboratif dan layanan multisektoral, baik itu yang dilakukan oleh UPT PPA maupun pemerintah Kota dan Kabupaten terhadap penanganan korban kekerasan seksual, baik perempuan dan anak sudah banyak yang mengkajinya. Hal ini terlihat dari pembahasan yang memiliki kesamaan seperti peran UPT PPA, strategi kolaborasi, layanan secara komprehensif, dan beberapa kesamaan lainnya. Namun, peneliti mengidentifikasi bahwa masih terdapat beberapa kekosongan yang menurut peneliti perlu dilakukan kajian dan pendalaman oleh peneliti selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisis penulis, perbedaan yang paling mendasar antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus pada pola strategi kolaborasi secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan teori *collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak. Peneliti melihat bahwa beberapa penelitian terdahulu telah menyentuh aspek yang ada di dalam teori *collaborative governance*, namun belum dilakukan secara komprehensif dengan menekankan pada empat aspek utama yaitu : (1) kondisi awal kolaborasi, mencakup sejarah hubungan kerja sama, kepercayaan antar anggota kolaborasi, adanya perbedaan fungsi dan keterbatasan layanan; (2) desain kelembagaan, meliputi adanya aturan formal seperti MoU, SOP, dan forum pertemuan lintas sektoral; (3)

kepemimpinan fasilitatif, menekankan adanya peran pemimpin dalam merumuskan kebijakan dan memfasilitasi komunikasi dan memediasi kepentingan; (4) proses kolaborasi, melihat tingkat keberhasilan proses kolaborasi dalam mewujudkan layanan komprehensif.

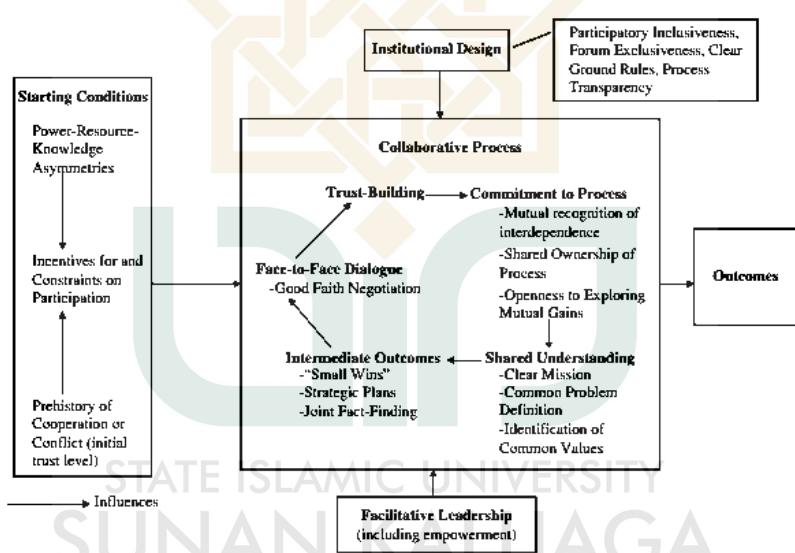
Cakupan penelitian ini juga lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada beberapa aspek tertentu, karena penelitian ini melibatkan pola kerja sama lintas sektoral dan menekankan pada keterlibatan maupun komitmen dalam menciptakan layanan secara komprehensif. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka penulis mengambil topik penelitian terkait “Strategi Kolaboratif UPT PPA Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan Layanan Komprehensif bagi Korban Kekerasan Seksual Anak”

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *Collaborative governance* menurut Ansell dan Gash. Teori *Collaborative governance* digunakan untuk menguraikan dan mendeskripsikan secara menyeluruh terkait keterlibatan berbagai elemen lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah melalui integritas yang dibentuk bersama-sama dalam memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan seksual.

Istilah tata *Collaborative governance* didefinisikan oleh Ansell dan Gash sebagai sebuah pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga public terlibat secara langsung bersama pemangku kepentingan non-negara dalam suatu proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan bersifat musyawarah yang memiliki maksud dan tujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau pengelolaan program dan asset publik.

Figure 1
A Model of Collaborative Governance



Gambar 1.2 Model Teori Collaborative Governance

Definisi terkait CGR sengaja dibuat luas yang terdiri dari berbagai macam sistem kolaboratif. Namun, definisi tersebut juga cukup spesifik untuk membedakan CGR dari kegiatan kolaboratif lainnya dalam empat cara utama. *Pertama*, CGR memiliki orientasi kebijakan public atau layanan public yang luas. *Kedua*,

CGR merupakan sistem lintas organisasi yang melibatkan berbagai organisasi otonom yang mewakili berbagai kepentingan dan yurisdiksi yang berbeda. *Ketiga*, CGR mengembangkan norma atau aturan kelembagaan atau procedural yang disengaja yang mendorong kolaborasi. *Keempat*, CGR mengalami interaksi berulang antara para pesertanya dan aktif selama beberapa periode.²⁵

Dalam kajian mengenai kolaborasi, terdapat empat variabel utama dalam model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2008). Proses kolaboratif menjadi inti dari model ini, didukung oleh tiga variabel lainnya, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif.²⁶ *Pertama*, kondisi awal. Fase kondisi awal dalam hubungan kolaborasi antara tiap-tiap lembaga menyimpan kepentingan dan latar belakang yang berlainan dengan visi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini akan menghasilkan hubungan sejalan dalam hubungan yang digerakan. *Kedua*, kepemimpinan fasilitatif. Ryan dalam Ansell dan Gash mengenali tiga elemen terkait kepemimpinan kolaboratif yang efektif yaitu manajemen yang cukup terhadap kolaborasi, pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis, dan memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang

²⁵ Kirk Emerson and Tina Nabatchi, “Collaborative Governance Regimes,” in *Sustainability (Switzerland)* (Amerika Serikat: Georgetown University Press, 2019), 17–19.

²⁶ Hefsa Pebriani and Annada Nasyaya, “Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Ogan Komering Ulu,” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 8, no. 2 (2023): 139–140.

kredibel dan meyakinkan semua actor atau lembaga terkait. *Ketiga*, desain kelembagaan. Pada tahap ini, desain kelembagaan berkenaan dengan peraturan dan tata cara dasar dalam sebuah kolaboratif yang ditekankan pada validitas metode dalam proses kolaborasi. Proses kolaborasi yang patut untuk dititikberatkan adalah pemerintah mesti bersifat terbuka, inklusif dan eksklusif. *Keempat*, proses kolaborasi. Gray dalam Ansell dan Gash menjelaskan tahapan proses kolaborasi antara lain yaitu *problem setting* (penentuan permasalahan), *direction setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan proses kolaboratif menurut Ansell dan Gash yaitu *face to face dialog*, membangun kepercayaan, komitmen *to process, share understanding*, dan hasil.²⁷

Keterlibatan antara lembaga pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat dikenal sebagai tata kelola kolaboratif (*Collaborative governance*) yang bertujuan untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, *Collaborative governance* juga bertujuan untuk memperkuat kelembagaan guna mencapai tujuan bersama. Konsep kolaboratif antar lembaga tidak muncul secara mendadak, melainkan hasil dari inisiatif berbagai pihak untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam penyelesaian

²⁷ Ersi Monika, Henny Aprianty, and Edi Darmawi, “Collaborative Governance (Studi Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bengkulu),” *Mimbar : Jurnal Penelitian Soial dan Publik* 12, no. 1 (2023): 118–119.

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.²⁸ Oleh karena itu, pengambilan keputusan kolektif merupakan hal sekunder dari definisi kemitraan public-swasta. Sebaliknya, pelembagaan proses pengambilan keputusan kolektif merupakan hal yang penting dalam definisi tata kelola kolaboratif.²⁹

Berdasarkan teori *Collaborative Governance* yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash serta didukung oleh berbagai penelitian terdahulu, penelitian ini berdiri di atas pemahaman bahwa efektivitas layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak tidak dapat diwujudkan secara maksimal tanpa adanya strategi kolaboratif secara berjejaring yang terencana dan berkesinambungan. Hal ini dipengaruhi oleh masalah kekerasan seksual anak yang begitu kompleks melibatkan dimensi hukum, sosial, kesehatan, dan psikologis. Sehingga perlu adanya keterlibatan berbagai aktor seperti pemerintah daerah, lembaga hukum, lembaga kesehatan, lembaga sosial, maupun organisasi masyarakat lainnya.

Penelitian ini menggunakan lima komponen utama dari teori *Collaborative Governance* sebagai kerangka analisis, yaitu: (1) kondisi awal kolaborasi, mencakup sejarah hubungan kerja sama, kepercayaan antar anggota kolaborasi, adanya perbedaan fungsi dan keterbatasan layanan; (2) desain kelembagaan, meliputi

²⁸ C. Pagitha Rahmawati and Diana Hertati, “Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya,” *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023): 2–3.

²⁹ Chris Ansell and Alison Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice,” *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 548.

adanya aturan formal seperti MoU, SOP, dan forum pertemuan lintas sektoral; (3) kepemimpinan fasilitatif, menekankan adanya peran pemimpin dalam merumuskan kebijakan dan memfasilitasi komunikasi dan memediasi kepentingan; (4) proses kolaborasi, melihat tingkat keberhasilan proses kolaborasi dalam mewujudkan layanan komprehensif.

Kelima komponen di atas akan dianalisis dengan melihat pola strategi yang dibangun dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak dan melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta. Dalam kata lain, analisis ini tidak hanya menyoroti bagaimana kolaborasi yang dijalankan secara struktural, tetapi juga bagaimana dinamika hubungan kelembagaan dapat berpengaruh terhadap layanan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual anak. Adapun peta konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Tabel 1.1 Peta Konseptual Teori *Collaborative Governance*

Dengan adanya kerangka konseptual di atas, peneliti dapat menentukan dan mendeskripsikan arah analisis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana kolaborasi yang dibangun, dijalankan, dan berkontribusi terhadap terwujudnya layanan komprehensif bagi korban kekerasan

seksual. *Kedua*, melihat faktor pendukung dan penghambat kolaborasi dapat berdampak terhadap layanan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan situasi atau fenomena sosial di dalam sebuah masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian yang bersifat humanistic, dimana manusia dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subjek utama dalam suatu peristiwa sosial.³⁰ Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan sebuah angka-angka. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.³¹

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam terkait pola strategi kolaborasi yang dibangun oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak dalam bentuk penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus untuk

³⁰ Rizal Safrudin et al., “Penelitian Kualitatif,” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.

³¹ Lexxy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 6.

memperoleh informasi yang lebih jelas dengan model wawancara, dokumentasi, pemanfaatan dan pengamatan lapangan. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan realitas yang ada, memberikan gambaran yang mendalam dan realistik. Penelitian ini juga akan menguraikan dan menggali terkait pola dan mekanisme pelayanan yang dilakukan, baik dalam bentuk program, kerja sama lintas sektoral, praktek yang dijalankan, alur layanan, kebijakan, serta memahami berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam proses penanganan korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi tempat untuk pengambilan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan melihat situasi di lapangan berdasarkan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta yang beralamat di Komplek Balai Kota, Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sumber Data

Data dipahami sebagai kenyataan yang ada dan memiliki fungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun sebuah pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan yang atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan sebuah

informasi atau keterangan yang aktual.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data untuk mengumpulkan informasi yang selaras dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun kedua sumber data tersebut yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Data ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan pengamatan terhadap informasi yang hendak diperoleh. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai informan yang ada di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta dan beberapa pihak terkait yang mendukung penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini telah dilakukan kepada lima orang informan yaitu Kepala UPT PPA Kota Yogyakarta, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Manajer Kasus, Kabid P3 DP3AP2KB Kota Yogyakarta, dan Satgas Sigrak.
- b. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber yang aktual dan terpercaya melalui buku-buku, hasil laporan penelitian terdahulu, jurnal, artikel ilmiah, tesis, peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah dan kota,

³² Muhajirin and Maya Panorama, “Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif” (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 199.

dokumen resmi UPT PPA Kota Yogyakarta, publikasi kementerian, serta sumber-sumber lainnya yang bisa digunakan untuk mendukung dan melengkapi hasil wawancara di lapangan sehingga analisis dapat dilakukan secara mendalam.

4. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu.³³

Adapun yang menjadi subjek di dalam penelitian ini adalah kepala UPT PPA Kota Yogyakarta, KA. Sub Bag TU, Manajerial Kasus, Satgas Sigrak, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagian pengelolaan kasus. Kualifikasi dalam menentukan informan pada penelitian ini terdiri dari beberapa kriteria yaitu; (1) pihak UPT PPA dan mitra kunci yang terlibat langsung dalam proses kolaborasi dan penanganan kasus, (2) pihak yang terlibat di dalam proses perumusan kebijakan, kerangka kolaborasi dan jejaring kerja, (3) kemampuan dan kesiapan memberikan informasi terhadap masalah yang sedang diteliti, (4) informan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

³³ Abdul Fattah Nasution, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), 80.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pekerjaan seorang peneliti yang sulit dihindari dalam melakukan sebuah penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.³⁴ Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu dua bulan, yakni sejak tanggal 20 Agustus hingga 20 Oktober 2025. Adapun uraian terkait teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.³⁵ Peneliti melakukan observasi dengan langsung turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung aktivitas, keterangan aktor yang terlibat, mendengar secara langsung gambaran nyata mengenai pola strategi UPT PPA Kota Yogyakarta dalam penanganan korban kekerasan seksual anak, memahami mekanisme kolaborasi yang dibentuk, memahami keterlibatan lembaga lintas sektoral, dan melihat keterlibatan UPT PPA sebagai

³⁴ Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 163–164.

³⁵ Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)” (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 309–312.

koordinator dan fasilitator dalam mewujudkan layanan yang bersifat komprehensif. Tujuannya untuk melihat gambaran pasti dan sebagai bukti kuat untuk mendukung penelitian ini. Serta menghindari data yang dikumpulkan hanya sebatas presepsi atau dugaan peneliti semata.

Penelitian mengenai Pola Strategi Kolaboratif UPT PPA Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan Layanan Komprehensif bagi Korban Kekerasan Seksual Anak peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipatif. Observasi non-partisipatif, yaitu observasi hanya diam saja menjadi pengamat tanpa terlibat dalam hal yang akan diteliti, melakukan pengamatan, mendengar dan mencatat.³⁶

Observasi non-partisipatif dilakukan mengingat adanya batasan bagi peneliti untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses pendampingan dan maupun wawancara secara langsung kepada korban yang ditangani oleh UPT PPA Kota Yogyakarta. Peneliti dalam hal ini hanya mengamati, mencerna, menganalisis strategi yang dilakukan melalui wawancara mendalam yang disampaikan oleh informan terkait proses atau mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta. Selain itu, mencatat bagaimana pihak terkait yang terlibat mendeskripsikan pengalamannya dalam proses penanganan dan selanjutnya

³⁶ Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, and Sri Jumiyati, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), 107–108.

peneliti membuat kesimpulan dari mekanisme kolaboratif yang dibangun. Teknik non-partisipatif yang dilakukan diharapkan dapat menjawab permasalahan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan pengetahuan tentang kebijakan pendampingan kepada para korban kekerasan seksual anak.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.³⁷

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan semi terstruktur untuk melihat pola strategi UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi bagi korban kekerasan seksual anak. Teknik wawancara terstruktur dilakukan penulis dengan menyusun terlebih dahulu instrumen pertanyaan secara terperinci dan sistematis berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Sedangkan wawancara semi

³⁷ W. Gulo, “Metodologi Penelitian” (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 81.

terstruktur, penulis dapat melakukan penelitian secara alamiah tanpa diikat oleh pedoman atau format baku yang ketat. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara terbuka dan dapat menggali setiap variabel yang ingin diketahui oleh penulis sehingga informasi dapat diperoleh secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa informan sesuai dengan teknik dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari lima orang yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal Wawancara
1	Udiyati Ardiani, S. IP. M. IP	27 Agustus 2025
2	Elvika Fianasari, S.Pd	29 Agustus 2025
3	Andriana Dwi Asanti, SE	17, 24 Februari dan 28 Agustus 2025
4	Ria Ratnawati, SSTP	29 Agustus 2025
5	Linda Eka Wati	03 September 2025

Tabel 1.2 Daftar Informan Penelitian

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen atau bahan-bahan tertulis, cetak, dan rekaman peristiwa yang berhubungan dengan hal yang ingin diteliti.³⁸ Metode

³⁸ Bambang Rustanto, “Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 60–61.

dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan seluruh data-data dan dokumen yang ada di UPT PPA baik berupa foto, rekaman, dokumen, arsip, laporan dan hasil wawancara.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan model yang dijelaskan oleh Miles and Huberman yaitu berupa reduksi data, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Pokok utama dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan informasi lapangan dengan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, mendalam, dan dokumentasi. Melalui cara ini, peneliti memperoleh data yang beragam dan mendalam terkait strategi kolaboratif UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan secara komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual. Mulai dari kebijakan, mekanisme pelayanan, kerja sama lintas sektor, dan proses reintegrasi sosial.

b. Data *Reduction* (Reduksi Data), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal ini,

peneliti akan berusaha memilah dan memilih hasil informasi yang didapatkan sesuai dengan rumusan maupun tujuan penelitian ini.

- c. Data *Display* (Penyajian Data), yaitu setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Setelah data direduksi, peneliti akan melakukan penyajian data. Pada tahapan ini, data disusun dalam bentuk deskriptif, table, atau rangkuman terstruktur, sehingga memudahkan dalam membaca dan memahami informasi yang didapatkan. Selain itu, agar data yang disajikan tidak keluar dari rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai, maka peneliti akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan fokus penelitian.
- d. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan) yaitu langkah terakhir dalam melakukan analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis dari penelitian ini merupakan kesimpulan dari semua data yang telah didapatkan.³⁹ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan gambaran inti bagi pembaca maupun peneliti lainnya yang ingin mengkaji seputar topik penelitian yang sama.

³⁹ Sugiyono, “Metode Penelitian Manajemen” (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 404–412.

7. Validasi Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada.⁴⁰ Peneliti melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang diperoleh itu salah atau tidak. Data yang telah peneliti kumpulkan baik berupa catatan atau rekaman, selanjutnya peneliti membaca dan mendengarkan kembali untuk dituangkan ke dalam penelitian ini. Selain itu, triangulasi ini dilakukan untuk membandingkan informasi dari pihak UPT PPA Kota Yogyakarta dan pihak terkait lainnya yang berpartisipasi dalam proses penyelenggaran penanganan korban kekerasan seksual anak. Misalnya membandingkan antara kegiatan internal UPT PPA dan mitra kolaborasi lainnya seperti Satgas Sigrak dalam proses keterlibatannya secara langsung kepada korban.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan pada penelitian yang akan dilakukan, maka kemudian peneliti memberikan gambaran terkait sistematika penulisan yang ada di dalam setiap bab penelitian ini. Pada bagian ini, sistematika pembahasan dibuat untuk mempermudah penyusunan laporan dan memberikan gambaran terkait laporan penelitian ini. Pembahasan yang ada dalam penelitian ini disusun

⁴⁰ Mohammad Mulyadi, “Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Serta Praktek Kombinasinya Dalam Penelitian” (Jakarta Utara: Publica Institute, 2011), 126–127.

kedalam empat bab dan setiap bab tersebut berisi sub bab pembahasan. Adapun rincian setiap pembahasan yang telah disusun peneliti sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini dijelaskan bagian pendahuluan yang mencakup beberapa sub pembahasan seperti berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, studi pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bagian ini menguraikan seputar lokasi penelitian, alur layanan, data kekerasan seksual dan jejaring kolaborasi yang dilakukan dan dibentuk oleh UPT PPA Kota Yogyakarta.

BAB III, pada bab ini membahas tentang pola strategi kolaborasi yang dibangun oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam memberikan layanan komprehensif kepada korban kekerasan seksual anak.

BAB IV, bab ini menguraikan terkait faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak.

BAB V, Pada bagian ini berisi terkait kesimpulan dari pembahasan tesis ini yaitu pola strategi kolaboratif UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak. Selain itu, bagian ini berisi rekomendasi dan saran kepada pihak terkait agar peneliti ini bermanfaat dan diakui secara akademik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kolaboratif UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak telah berjalan secara kolaborasi dan terpadu melalui sistem jejaring yang melibatkan lembaga hukum, lembaga sosial, lembaga kesehatan dan lembaga masyarakat yang tergabung ke dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK). Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola strategi kolaborasi yang dibangun oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak telah dijalankan melalui beberapa strategi. *Pertama*, pembentukan jaringan mitra kolaborasi. Pada bagian ini UPT PPA menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga lintas sektoral untuk menjembatani kebutuhan anak baik aspek medis, hukum, sosial, dan psikososial. *Kedua*, koordinasi formal dan non formal berbasis SOP dan MoU. Strategi ini mencerminkan mekanisme komunikasi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan kasus, membangun kepercayaan, dan komitmen antar aktor yang terlibat. Dalam praktiknya, koordinasi ini didukung oleh adanya Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang berfungsi sebagai wadah untuk

menyatukan pandangan, mempercepat penanganan, memperkuat perlindungan anak dan untuk memperkuat jejaring lembaga lintas sektoral. *Ketiga*, penguatan kapasitas SDM. Upaya ini dilakukan untuk peningkatan layanan dan kompetensi para pendamping sosial. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan pelatihan, workshop, dan penguatan kerja sama dengan berbagai pihak jejaring kolaborasi. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan layanan dan pengetahuan pihak yang terlibat dalam proses penanganan korban kekerasan seksual anak. Selain itu, penguatan ini bukan hanya sekedar kegiatan rutin, melainkan sebuah strategi untuk membentuk pondasi layanan yang berkualitas. *Keempat*, inovasi layanan. Strategi ini dilakukan melalui layanan berbasis digital, layanan *home visit*, dan kinesiology. Strategi inovasi layanan ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas penanganan kasus, tetapi hal ini menunjukkan kesadaran dan kepedulian UPT PPA terhadap berbagai kendala struktural yang kerap dihadapi korban dalam mengakses layanan. Mulai dari layanan berbasis online atau pendekatan yang lebih ramah anak.

UPT PPA juga menerapkan sistem layanan terpadu satu pintu (*One-Stop Service*) yang tercermin dari alur layanan komprehensif mulai dari pengaduan, verifikasi pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan dan rujukan,

penjangkauan korban, penampungan sementara, hingga tahap terminasi, monitoring dan evaluasi. Layanan ini dilakukan untuk menjawab dan mengatasi masalah-masalah struktural yang kerap kali dihadapi oleh anak, mulai dari masalah mobilitas dan aksesibilitas layanan.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mewujudkan layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual anak. Faktor pendukung meliputi kapasitas SDM UPT PPA, komitmen yang kuat antar jejaring mitra, dan dukungan dari pemerintah. Ketiga faktor pendukung ini menghadirkan adanya pola sistem kolaborasi yang kuat terhadap penanganan kasus kekerasan seksual anak. Namun di sisi lain, UPT PPA juga menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, kondisi dan masalah korban, serta kebijakan dan birokrasi.

Strategi kolaboratif yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta bersama lembaga lintas sektoral berjalan sangat baik dan efektif. Namun, pada saat yang sama pula UPT PPA masing menghadapi hambatan dan tantangan. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan UPT PPA dalam menjaga stabilitas kerja sama, memperkuat koordinasi, dan memperbaiki kekurangan layanan yang ada, sehingga proses penanganan terhadap korban kekerasan seksual dapat ditangani dengan efektif

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penlitian ini, terdapat beberapa saran utama yang dapat dijadikan acuan:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti sadar akan keterbatasan pembahasan dalam penelitian ini. Sehingga bagi peneliti yang akan mengkaji tentang strategi kolaboratif dalam menciptakan layanan komprehensif di lembaga UPT PPA dapat difokuskan pada aspek layanan berbasis komunitas, mengingat keterlibatan komunitas perempuan dan anak sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya bisa mengambil lebih banyak informan di luar dari lembaga UPT PPA sehingga dapat dilihat secara lebih jelas pola kolaborasi yang terbentuk dalam mewujudkan layanan komprehensif.

2. Kebijakan Sosial

- a. Optimalisasi kebijakan: Kebijakan terkait MoU atau SOP antar lembaga perlu disusun dan diinternalisasikan secara kuat dan terstruktur di masing-masing lembaga mitra, sehingga proses penanganan kasus dapat dijalankan secara cepat dan efektif.
- b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Profesional: Pemerintah daerah melalui UPT PPA Kota Yogyakarta perlu meningkatkan kapasitas tenaga pendamping agar memiliki pemahaman yang mendalam terhadap

pendekatan multidimensi khususnya korban yang mengalami disabilitas. Selain itu, penting untuk menambah tenaga profesional dalam hal ini pekerja sosial yang berfokus pada setting disabilitas agar proses intervensi yang dilakukan bisa lebih inklusif.

- c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu selalu ditingkatkan, seperti edukasi publik dan peningkatan literasi terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu senantiasa dioptimalkan, sehingga layanan komprehensif dapat berjalan efektif dan masyarakat bisa lebih proaktif dalam melindungi anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Nur. "Kontrol Sosial DPPPA Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Almanshur, Djunaidi Ghony and Fauzan. "Metodologi Penelitian Kualitatif." 163–164. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 548.
- Aura Aulia Putri S. "Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 71.
- Dwiyanti, Tetty, and Musdalipah. "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Makassar." *YUME : Journal of Management* 5, no. 1 (2022): 58–67.
- E.Ericson, and Sutrisno. "Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bogor Dan Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus KDRT." *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2024): 1–13.
- Emerson, Kirk, and Tina Nabatchi. "Collaborative Governance Regimes." In *Sustainability (Switzerland)*, 17–19. Amerika Serikat: Georgetown University Press, 2019.
- Fasicha, Chariratul Azani, Didin Muhamfidin, and Sawitri Budi Utami. "Strategi Kolaboratif Multisector Dalam Mengatasi Perundungan Anak: Studi Kasus Kota Bogor." *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)* 10, no. 1 (2024): 40–64.

- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, and Sri Jumiyati. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” 107–108. Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fitriana, Aulia Regita Dewi, and Arimurti Kriswibowo. “Case Management Approach to Overcoming The Violence Against Child (Study at the Regional Technical Implementation Unit for the Women and Children Protection, Sidoarjo Regency).” *Journal of Economics, Business, and Government Challenges* 5, no. 01 (2022): 66–74.
- Furi, Viezna Leana, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih. “Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 122–129.
- Gulo, W. “Metodologi Penelitian.” 81. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Hidayat, Fahrunnisa, Fahrunnisa, Aena Mardiah, and Ahmad Hidayat. “Persepsi Penyedia Layanan Bagi Penyintas Kekerasan Seksual Terhadap Layanan Manajemen Klinis Perkosaan.” *Seminar Nasional Sosiologi* 4, no. 1 (2023): 149–173.
- Khoirunnisa, Regita, Muhammad Fedryansyah, and Risna Resnawaty. “Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan.” *Jurnal Pekerjaan Sosial* 22, no. 1 (2023): 218–225.
- Kristoforus Tueng Ruing, Frans Bapa Tokan, and Eusabius Separera Niron. “Kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Lsm Permata Lembata Dalam Merehabilitasi Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Lembata.” *Journal Education and Government Wiyata* 3, no. 1 (2025): 214–215.
- Maharani, Devi Sri, Nazaki Nazaki, and Uly Sophia. “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Pendampingan Korban

- Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur.” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 3 (2024): 1367.
- Makmur, Chesa Syaqira, Septiana Dwiputri Maharani, and Budi Andayani. “The Role of Women and Children Protection Technical Implementation Units in Alleviating Child Abuses during the Covid-19 Pandemic.” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 17, no. 1 (2022): 46.
- Moleong, Lexxy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” 6. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Monika, Ersi, Henny Aprianty, and Edi Darmawi. “Collaborative Governance (Studi Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bengkulu).” *Mimbar : Jurnal Penelitian Soial dan Publik* 12, no. 1 (2023): 118–119.
- Mulyadi, Mohammad. “Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Serta Praktek Kombinasinya Dalam Penelitian.” 126–127. Jakarta Utara: Publica Institute, 2011.
- Nababan, Panagitab, Roida Lumbantobing, Harisan Boni Firmando, Maringen Sinambela, and Sudirman Lase. “Analisis Strategi Pendampingan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Di Tapanuli Tengah.” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan* 15, no. 4 (2024).
- Nasution, Abdul Fattah. “Metode Penelitian Kualitatif.” 80. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.
- Nuraisyah, Dandan Haryono, and Sri Heryanianto. “Collaborative Governance In Child Protection in Tasikmalaya Regency.” *Proceedings of the 2nd International Interdisciplinary Conference on Environmental Sciences and Sustainable Developments Education and Green Economy (IICESSD-EGE 2022)* (2023): 113–119.
- Panorama, Muhajirin and Maya. “Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuntitatif.” 199. Yogyakarta: Idea

Press Yogyakarta, 2017.

- Pebriani, Hefsa, and Annada Nasyaya. "Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Ogan Komering Ulu." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 8, no. 2 (2023): 139–140.
- Probilla, Syuha Maisytho, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Syuha." *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021* 2, no. 1 (2021): 32.
- Putri, Devina Agnes Berlian Atika, and Tukiman. "Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 3 (2023): 274–283.
- Rahmawati, C. Pagitha, and Diana Hertati. "Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023): 2–3.
- Rahmi, Nuzulul, Nofriadi, and Saddam Rassanjani. "Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 7, no. 1 (2023): 4–5.
- Razak, Abdul Hamied. "Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Ini Upaya DP3AP2 DIY." Accessed January 20, 2025. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/08/05/510/183702/kasus-kekerasan-anak-meningkat-ini-upaya-dp3ap2-diy>.
- Rustanto, Bambang. "Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial." 60–61. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. "Penelitian Kualitatif." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.

- Sarah, Siti. "Systematic Literature Review: Riset Pelecehan Seksual Pada Anak Di Indonesia." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 18, no. 2 (2023): 328–329.
- Sayyid, Mhd, Ihsan Rambe, and Atikah Rahmi. "PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand)." *Jurnal Ilmiah Penelitian* V, no. 1 (2024): 20–30.
- Shaikh, Ulfat, Melissa Gosdin, and Elizabethe Helmke. "Multisector Collaborations at Children's Hospitals to Address Social Drivers of Health." *International Journal for Quality in Health Care* 37, no. 3 (2025): 1–9.
- Solehati, Tetti, Riezky Fajri Septiani, Rizka Muliani, Selly Amalia Nurhasanah, Sifa Nur Afriani, Sifa Nuraini, Sifva Fauziah, et al. "Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 2202.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)." 309–312. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- . "Metode Penelitian Manajemen." 404–412. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Ulfa, Siti Maria, and Listyaningsih. "Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tangerang." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 8, no. 2 (2024): 62–80.
- "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta." Accessed September 3, 2025. <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/page/visi-misi>.
- "Keputusan Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Di UPT PPA Kota Yogyakarta." Yogyakarta, 2022.

“Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 320 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Tahun 2024-2027.” Yogyakarta, 2024.

“Kepwal Normor 301 Tahun 2023 Tantang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berbasis Gender.” Yogyakarta, 2023.

“Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender,” 2025.

“Profil UPT PPA Kota Yogyakarta” (2025).

“Sinfoni Kemen PPPA.” Accessed March 5, 2025.
<https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>.

WAWANCARA

Udiyati Ardiani, S. IP. M. IP, Selaku Kepala UPT PPA Kota Yogyakarta, Pada Tanggal 27 Agustus 2025.

Andriana Dwi Asanti, SE, Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pada Tanggal 28 Agustus 2025.

Elvika Fianasari, S.Pd, Selaku Pengelola Pembinaan & Perlindungan Anak (Manajer Kasus), Pada Tanggal 29 Agustus 2025.

Linda Eka Wati, Selaku Koordinator Satgas Sigrak Kecamatan Umbulharjo, Pada Tanggal 03 September 2025.

Ria Ratnawati, SSTP, Selaku Kabid P3 DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Pada Tanggal 29 Agustus 2025.